

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A Telaah Pustaka

##### 1. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang digunakan untuk membantu para manajer sektor publik dalam menilai pencapaian suatu strategi dengan menggunakan alat ukur finansial dan non finansial, selain itu sistem pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi karena didalam pengukuran kinerja juga diterapkan *reward and punishment system*.

Indra (2006:274) mendefinisikan kinerja sebagai berikut :

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Dalam situasi partisipatif, seseorang akan meningkatkan kinerja bila berada pada posisi yang lebih tinggi.

Menurut Moehariono (2014:95) mendefinisikan kinerja sebagai berikut :

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu dan sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi.

Kinerja Sumber Daya Manusia merupakan istilah yang berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi Kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang (dalam Mangkunegara (2001 :67)

Sedangkan menurut Mangkunegara (2001:67) mendefinisikan kinerja adalah sebagai berikut:

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusan tersebut. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja dibagi dua yaitu informasi finansial dan informasi nonfinansial (Wawan Dan Kia, 2009). Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu perlu dikembangkan ukuran kinerja nonfinansial (Mardiasmo,2009)

Menurut Mardiasmo(2002:122), pengukuran kinerja dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down dan bottom up*)
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat di telusuri perkembangan pencapaian strategi
3. Untuk mengkomodasi pemahaman, kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Menurut Mardiasmo(2002:128) Peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain :

1. Untuk memperjelas tujuan organisasi.
2. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan.
3. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial.
4. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan.
5. Untuk menunjukkan standar kinerja.
6. Untuk menunjukkan efektivitas.
7. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran.
8. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya..

## 2. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Menurut Keith Davis (1985:77) dalam Mangkunegara (2001 :113), mengemukakan Partisipasi adalah :

Keterlibatan emosi dan mental pegawai dalam situasi kelompok yang mengiatkan mereka untuk menyumbang pada tujuan kelompok serta bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan, pengertian anggaran adalah :

Pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Menurut Mardiasmo (2002:61) difinisi anggaran adalah :

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran

finacial, sedangkan metode penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Karakteristik anggaran menurut Anthony (2005 :73) sebagai berikut :

- a. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah moneter
- b. Biasanya meliputi jangka waktu satu tahun
- c. Merupakan komitmen manajer, manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran.
- d. Usulan-usulan di tinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran.
- e. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu,
- f. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran-anggaran, dan varian dianalisis serta dijelaskan.

Menurut Bastian (2010 : 191) anggaran berfungsi sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi.

Menurut Mardiasmo (2002 : 70) yang menjelaskan bahwa mekanisme penyusunan anggaran tidak terdapat perbedaan antara sektor swasta dan sektor publik. Siklus penyusunan anggaran meliputi :

1. Tahap persiapan anggaran  
Pada tahap ini, perlu dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar kisaran pendapatan yang tersedia. Namun yang perlu diperhatikan yaitu sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, maka hendaknya terlebih dahulu melakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.
2. Tahap ratifikasi anggaran  
Pada tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki kemampuan manajerial namun juga harus mempunyai kemampuan politisi, serta mampu dalam membangun koalisi yang memadai.

3. Tahap pelaksanaan anggaran

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, maka manajer keuangan publik pada saat ini dan dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran berikutnya.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran

Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan terkait aspek akuntabilitas. Jika pada tahap implementasi telah didukung oleh sistem yang baik, maka tahap pelaporan dan evaluasi diharapkan tidak akan menemui banyak masalah.

Berdasarkan karakteristik anggaran yang disebutkan di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa anggaran memiliki sifat khas tertentu dengan mengukur anggaran dalam satuan keuangan dan non-keuangan, yang dibuat oleh manajemen sebagai bentuk komitmen dalam pencapaian tujuan organisasi yang umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.

Pada umumnya semakin besar keterlibatan para pemerintah SKPD dalam merumuskan sesuatu hal yang dapat menghasilkan keputusan SKPD, maka sangat tinggi rasa tanggung jawab mereka untuk mensukseskan kesempatan atau keputusan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Dalam proses penyusunan anggaran aparat pemerintah diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, yaitu melalui perencanaan anggaran. Hal tersebut sangat penting berkenaan dengan adanya peningkatan kepuasan dan pegawai akan merasa lebih produktif sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang mendorong peningkatan kinerja. (Ni Luh Sri Rahayu, dkk :2014)

Bagaimanapun anggaran hanya efektif jika mendapat dukungan dari semua pihak, dan untuk mengusahaakan supaya anggaran ini mendapat

dukungan dari bawahan maka akan ditempuh melalui cara penyusunan secara demokratis atau *bottom up*. Jika ditinjau dari siapa yang membuat anggaran tersebut, maka penyusunan anggaran dimaksud dapat dilakukan dengan cara campuran. Penggunaan cara demokrasi inilah yang dimaksud dengan penyusunan anggaran partisipatif, karena disusun berdasarkan keputusan bawahan. (Hidayati Nufus: 2015)

Jadi partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam menyusun dan memutuskan anggaran secara bersama.

### 3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Wirawan (2015:20) Sumber Daya Manusia merupakan orang-pegawai, karyawan, buruh- yang bekerja untuk suatu organisasi, perusahaan melaksanakan aktivitasnya, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, tentara, polisi dan sebagainya yang direkrut untuk melaksanakan aktivitas manajemen organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Mallinda (2016) Sumber Daya Manusia merupakan hal terpenting didalam organisasi. Dengan adanya sumber daya manusia aktivitas-aktivitas dalam organisasi dapat terlaksana. Memiliki sumber daya yang berkualitas sangat diperlukan guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya didalam organisasi.

Ukuran kualitas sumber daya manusia dilihat dari rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman (Dessler:1997 dalam Suci Derma Juita :2013) yaitu :

#### 1. Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk membudayakan manusia itu sendiri. Pendidikan dapat dibagi menjadi

- : (a) pendidikan formal, (b) pendidikan informal dan (c) pendidikan nonformal
- 2. Pelatihan  
Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya.
- 3. Pengalaman  
Dengan memiliki pengalaman seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan, lebih terampil, punya wawasan yang luas dan mudah beradaptasi dengan lingkungan.

Sumber daya manusia perlu dikelola, diatur dan dimanfaatkan agar dapat berfungsi secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi, karena merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap organisasi. (Suhanto:2012 dalam Ni Luh Sri Rahayu,dkk:2014). Melalui peningkatan sumber daya manusia akan mendorong kinerja pegawai pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia semakin tinggi pula kinerja pemerintah, sebaliknya semakin rendah kualitas sumber daya manusia, semakin rendah pula kinerja pemerintah. (Ni Luh Sri Rahayu,dkk :2014)

Dari beberapa pendapat diatas, maka kualitas sumber daya manusia adalah latar belakang pendidikan, pelatihan, keterampilan, kemampuan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan aktivitasnya untuk mencapai tujuan organisasi.

#### **4. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Bodnar dan Hopwood (2010: 1), Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Sistem informasi akuntansi melakukan hal tersebut dengan sistem manual atau melalui sistem

terkomputerisasi. Keberhasilan pelaksanaan sistem informasi akuntansi yang telah dirancang sangat dipengaruhi oleh faktor desain sistem yang mencerminkan adanya pemisahan tanggung jawab fungsional yang tepat dan sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik.

Menurut Romney dan Steinbart (2015 : 11 ) :

Terdapat lima komponen dalam sistem informasi akuntansi, yaitu :

1. orang yang menggunakan sistem
2. procedure dan intruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data
3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya
4. information technology infrastructure, meliputi komputer, perangkat perifer, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA
5. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA.

Suatu sistem informasi akuntansi terkandung unsur-unsur pengendalian, sehingga sangat mempengaruhi fungsi manajemen dalam melakukan pengendalian internal. Fungsi sistem informasi akuntansi berperan sekali atas pengendalian-pengendalian yang dilakukan perusahaan.

Suatu informasi dapat dikatakan memiliki manfaat dalam proses pengambilan keputusan apabila informasi tersebut disajikan secara akurat, tepat waktu dan relevan. Informasi saat ini telah diakui sebagai salah satu sumber daya atau investasi yang patut dikembangkan oleh suatu perusahaan yang diharapkan dapat memiliki kinerja yang lebih baik, sehingga dapat menjadi suatu sumber daya penyedia informasi yang cepat dan akurat serta dapat memberikan manfaat yang besar dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Diana (2001) dalam Handayani (2007) dan Maulidah Tri Astuti (2008) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi dipengaruhi secara positif oleh faktor-faktor sosial pemakai sistem, dimana faktor-faktor sosial ditunjukkan dari besarnya dukungan teman sekerja, manajer puncak, pimpinan dan organisasi.

Menurut Romney dan Steinbart (2015 : 11 ) :

SIA yang didesain dengan baik, dapat menambah nilai untuk organisasi dengan :

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa.
2. Meningkatkan efisiensi
3. Berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya.
5. Meningkatkan struktur pengendalian internal.
6. Meningkatkan pengambilan keputusan.

Suatu organisasi memerlukan sistem informasi untuk mempermudah pengelolaan organisasi tersebut, baik organisasi swasta maupun organisasi sektor publik. Pemerintah daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan SKPD untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan bantuan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibawahinya, yang merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Sistem

Informasi Pengelolaan SKPD merupakan sistem informasi akuntansi bagi pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sistem Informasi Pengelolaan SKPD dibuat untuk mempermudah penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan SKPD diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pengelolaan penatausahaan keuangan oleh setiap.

Dalam Maulidah Tri Astuti (2008) penerapan sistem informasi akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah diharapkan akan mengatasi kelemahan sistem akuntansi yang telah ada sebelumnya, yaitu:

1. Proses penyusunan yang lambat karena terdiri dari sub sistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu.
2. Memakai sistem *single entry accounting* yang tidak lagi memadai untuk menampung kompleksitas transaksi-transaksi keuangan pemerintah daerah.
3. Sulit dilakukan rekonsiliasi antar sub sistem.
4. Tidak dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah.
5. Tidak dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah.

Dari beberapa pendapat di atas, maka penerapan sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem atau komponen yang di gunakan untuk mempermudah data keuangan untuk pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar organisasi maupun di dalam organisasi.

## **5. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Dalam organisasi sektor publik, partisipasi penyusunan anggaran dan pengukuran kinerja tidak sebatas pada masalah pemakaian anggaran, namun pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek yang dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan kinerja. Aspek-aspek yang dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien seperti masukan, kualitas, keluaran, hasil, efisiensi. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran (permendagri No 13 tahun 2006).

Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa yang akan datang (Bastian, 2010:275). Agar suatu anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan koordinasi yang baik antara bawahan dengan atasan dalam penyusunan anggaran. Karena proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, adanya kemungkinan akan menimbulkan dampak fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Untuk mencegah dampak fungsional anggaran tersebut, kontribusi terbesar dari kegiatan penganggaran terjadi jika semua pihak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran (Similian, 2013 dalam Livina Alzena, 2015).

Penelitian Hidayati Nufus (2015) menyimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada SKPD.

## **6. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian (Suci Derma Juita :2014).

Sumber daya manusia adalah suatu aset bagi organisasi. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bakal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mendorong kinerja pegawai pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia semakin tinggi pula kinerja pemerintah, begitu juga sebaliknya semakin rendah kualitas sumber daya manusia maka semakin rendah kinerja pemerintah. (Ni luh Sri Rahayu, dkk : 2014).

Penelitian Suci Derma Juita (2013) menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD.

## **7. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sistem informasi yang diterapkan pada pemerintahan daerah serta semua SKPD yang dibawahnya adalah "Sistem Informasi Pengelolaan SKPD", yang merupakan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi serta semua SKPD yang dibawahnya. Sistem akuntansi Pemerintah Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan pengikhtisaran, sampai

dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tersedia “Sistem Informasi Pengelolaan SKPD” diharapkan dapat membantu setiap SKPD. “Sistem Informasi Pengelolaan SKPD” dibuat untuk mempermudah penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Penerapan sistem informasi pada organisasi akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam organisasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerapan sistem informasi pada organisasi dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap kinerja pegawai dan lembaga tersebut (Yesi Umitasari :2015)

Penelitian Maulidah Tri Astuti (2008) menyimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pada organisasi sektor publik memengaruhi kinerja individu secara positif dan signifikan

## 8. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1**

### **Daftar Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Peneliti/Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>
1	Ni Luh Sri Rahayu,dkk (2014)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya(SDM), dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupten Jembrana	Secara parsial variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan

			terhadap kinerja pemerintah daerah, penerapan sistem penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
2	Yessi Umitasari(2015)	Pengaruh Sistem Informasi dan Komitmen Manajemen terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Surabaya	Secara Parsial Sistem Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja pada SKPD Kota Surabaya sedangkan Komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Kota Surabaya.
3	Suci Derma Juita(2013)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang	Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD, komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD, komunikasi organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD
4	Mediaty(2010)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Secara parsial, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap aparatur pemerintah daerah.
5	Maulidah Tri Astuti (2008)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Individu (Penelitian pada SKPD di Pemerintah Kota Malang)	Penerapan sistem informasi akuntansi pada organisasi sektor publik mempengaruhi kinerja individu secara positif dan signifikan.

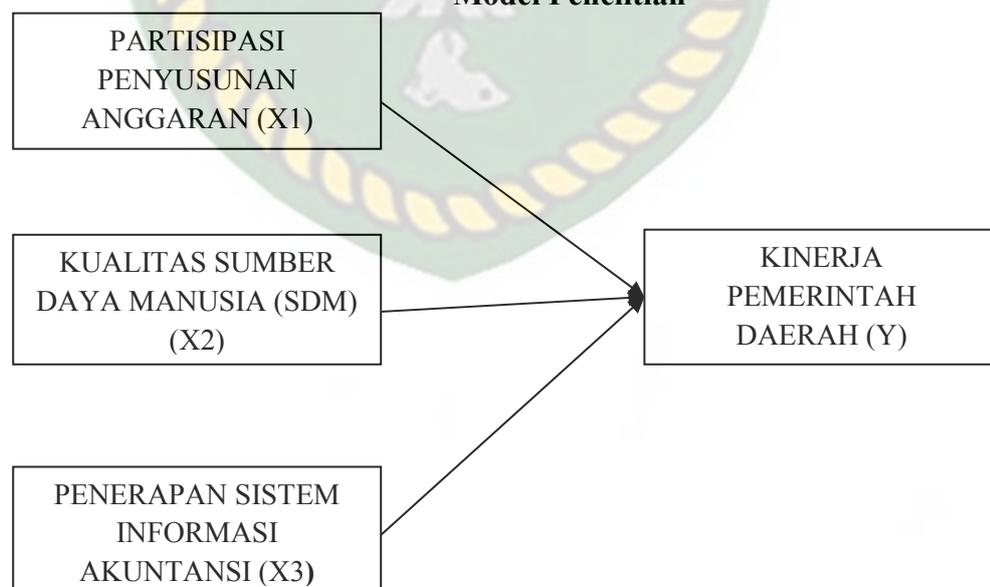
## 9. Model Penelitian

Model penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Model penelitian yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang diteliti jadi secara teoritis dapat dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Sri Rahayu(2014) yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia (SDM), penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan landasan teori diatas dapat disusun suatu model penelitian sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar II.1**  
**Model Penelitian**



## B. Hipotesis

Berdasarkan model penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kota Pekanbaru
- H2 : Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kota Pekanbaru.
- H3 : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Pekanbaru.
- H4 : Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia(SDM), Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kota Pekanbaru.